

Penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada kawasan gambut Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura

Ahmad Jamaan*¹, Febri Yuliani², Adianto², & Abdul Sadad²

¹Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

²Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

* ahmad.jamaan@lecturer.unri.ac.id

Abstrak. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sudah menjadi persoalan dunia akibat dampak yang ditimbulkannya. Di Riau sendiri, luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 42.000 Ha dan memberikan dampak buruk terhadap banyak bidang seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, perdagangan, pariwisata, bahkan jalannya roda pemerintahan. Walau banyak kalangan terlibat dan berbagai upaya telah dilakukan, akan tetapi hingga Agustus 2019 kebakaran masih sering terjadi. Tulisan ini fokus kepada upaya melibatkan kelompok masyarakat terutama petani di kawasan gambut berpartisipasi aktif mencegah terjadinya kebakaran. Masyarakat diberikan informasi dan edukasi untuk mampu mengolah lahan tanpa membakar. Selain itu, masyarakat juga dilatih sehingga keterampilan untuk memperkuat kelembagaannya melalui tiga aspek yaitu teknis, sosial budaya, dan ekonomi. Kegiatan ini meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga peduli dan awas terhadap kebakaran hutan dan lahan, dampak hukum serta kerugian yang akan ditimbulkan akibat kebakaran lahan. Masyarakat mampu menerapkan usaha pertanian melalui pembukaan lahan aman dari kebakaran dan ramah terhadap lingkungan dan memperkuat kelembagaan. Masyarakat juga telah mengembangkan tanaman sela berupa semangka di perkebunan mereka.

Kata kunci: gambut; kebakaran hutan dan lahan; partisipasi masyarakat; penguatan kelembagaan

Abstract. Forest and land fires in Indonesia have become a global problem due to their impact. In Riau alone, the area of burned land reached more than 42,000 hectares and had a negative impact on many fields such as transportation, education, health, trade, tourism, and even the running of government. Although many groups have been involved and various efforts have been made, until August 2019 fires were still frequent. This paper focuses on efforts to involve community groups, especially farmers in peatlands, actively participating in preventing fires. The community is given information and education to be able to cultivate the land without burning. In addition, the community is also trained so that the skills to strengthen their institutions through three aspects, namely technical, socio-cultural, and economic. This activity increases public awareness so that they are aware and aware of forest and land fires, the legal impact and losses that will be caused by land fires. The community is able to implement agricultural business through land clearing that is safe from fire and friendly to the environment and strengthening institutions. The community has also developed intercropping in the form of watermelons on their plantations.

Keywords: community participation; institutional strengthening; forest and land fires; peat

To cite this article: Jamaan, A., F. Yuliani, Adianto, & A. Sadad. 2019. Penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada kawasan gambut Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura. *Unri Conference Series: Community Engagement 1*: 470-476 <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.470-476>

© 2019 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2019

PENDAHULUAN

Selama puluhan tahun, kebakaran lahan dan hutan di Riau mayoritas disebabkan oleh perbuatan secara sengaja. Tujuannya sebagai upaya *land clearing* secara murah, mudah dan cepat. Akan tetapi dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan ini jauh lebih besar daripada keuntungan dan hasil yang diperoleh secara individu atau kelompok (juga industri). Ada beberapa penyebab mengapa kebakaran hutan dan lahan terjadi secara berulang kali, terutama di Kecamatan Dayun, Siak. Pertama, terkait dengan kelembagaan yang belum kuat untuk mengajak masyarakat menggunakan sistem pengolahan lahan tanpa bakar akibat kurangnya informasi dan teknologi. Kedua berkaitan dengan kurangnya keseriusan pemerintah dan anggota kelompok untuk melakukan sistem pengolahan lahan tanpa bakar dan terakhir kurangnya pemahaman pemanfaatan lahan bekas kebakaran untuk meningkatkan perekonomian.

Guna mengurai persoalan tersebut, ada ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yakni meningkatkan keterampilan masyarakat agar mampu menerapkan teknik membuka lahan pertanian tanpa bakar, pengelolaan air, dan budidaya pertanian di lahan gambut, serta panen dan pasca panen. Selain itu, dilakukan upaya mengasah keterampilan masyarakat sehingga mampu memperkuat kelembagaan, menganalisis usaha dan pasar, serta penumbuhan jiwa kewirausahaan. Terakhir dengan membangun perilaku masyarakat membuka lahan pertanian tanpa bakar, pengelolaan air, dan budidaya pertanian di lahan gambut berkelanjutan, serta panen dan pasca panen.

Kecamatan Dayun merupakan salah satu dari kawasan tempat sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Siak, Riau. Hal ini karena lahan di kawasan Dayun sebagian merupakan kawasan lahan dan hutan gambut. Sejak Januari 2019 hingga Juni, sudah beberapa kali kebakaran hutan dan lahan terjadi di kecamatan ini. Di Bulan Februari ada dua lokasi kebakaran lahan, dalam kawasan BOB PT BSP-Pertamina Hulu mencapai 250 Ha. Lokasi kedua di jalan lintas Siak-Dayun menghancurkan lahan hingga 20 Ha. Di bulan Juli, kebakaran lahan milik warga juga terjadi menghancurkan 1,5 Ha lahan gambut. Sementara titik api selalu saja bermunculan sewaktu-waktu.

Laporan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Riau menyebutkan sudah 3.533 Ha hutan terbakar di Riau tahun 2019 hingga Juli. Sementara data Kementerian Lingkungan Hidup mencatat total luas kebakaran hutan dan lahan di Riau mencapai 27.683 Ha. Kawasan terbakar adalah gambut dengan ketebalan mencapai tiga (3) meter. Perilaku membakar lahan di musim kemarau adalah penyebab utama kebakaran.

Dalam kurun waktu yang sama, sebanyak 16 petani di Riau telah menjadi tersangka pembakar lahan, sementara tidak satupun perusahaan atau korporasi yang menjadi tersangka. Padahal data Jikalahari menyebutkan ada 684 titik panas ditemukan di dalam areal konsesi perukaan hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit, di mana 279 titik di antaranya berpotensi menjadi titik api. Laporan Jikalahari pada Maret 2019 menyebutkan area korporasi yang terbakar yakni PT Sumatera Riang Lestari, PT Satria Perkasa Agung, PT Rimba Rokan Lestari, dan PT Surya Dumai Agro. Kebakaran di lahan perusahaan ini terjadi karena lalai menjaga lahan juga upaya memperluas lahan perkebunan mereka sendiri.

Dampak buruk dari kebakaran hutan dan lahan ini, selain terganggunya akses transportasi baik darat, sungai, udara, terhadap kesehatan (seperti mata, tenggorokan dan pernapasan), perekonomian, dan pendidikan. Apa lagi peristiwa ini terjadi secara berulang, terus menerus dan tidak memberi efek jera/efek kejut terhadap bukan hanya pelaku di lapangan akan tetapi juga terhadap pemilik lahan dan penanggungjawab tindakan pembakaran yang dilakukan secara sengaja ataupun akibat kelalaian.

Artikel ini membahas kegiatan penyuluhan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat terutama petani di Kecamatan Dayun agar memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap bahaya bakar lahan untuk kegiatan pertanian, terjadinya perubahan sikap individu dan kelompok terhadap metode pengolahan lahan pertanian kepada pengolahan ramah lingkungan dan peduli api sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani tanpa mengganggu aktivitas masyarakat secara luas.

Secara umum hal yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yaitu tindakan membakar secara meluas bermotifkan finansial, cara bercocok tanam penduduk dengan cara membakar di lahan gambut pada musim kemarau. Sementara meluasnya kebakaran disebabkan tidak optimalnya pencegahan oleh aparat, kurang cepat dan efektifnya pemadaman api. Sementara di sisi penegakan hukum tidak mampu menyentuh otak perencana, padahal bekas lahan kebakaran dapat dicari tahu siapa yang mengolah dan menadah hasilnya.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan proses penyalaan dan pembakaran bahan bakar hutan dan lahan dapat bersifat buatan manusia atau alami. Walaupun demikian, buatan manusia adalah penyebab utama berulangkalnya terjadi kebakaran hutan dan lahan, baik sengaja maupun tidak disengaja di Indonesia. Pilihan

membakar untuk membuka lahan pertanian di musim kemarau, menjadi utama mengingat biaya lebih murah, waktu yang diperlukan serta proses pengerjaannya juga lebih mudah. Sejak manusia mengenal dan menguasai teknologi api, maka api dianggap sebagai modal dasar bagi perkembangan manusia karena dapat digunakan untuk membuka hutan, meningkatkan kualitas lahan pengembalaan, memburu satwa liar, mengusir satwa liar, berkomunikasi sosial disekitar api unggun dan sebagainya (Soeriaatmadja: 1997: 125).

Ada 3 (tiga) sumber api yaitu disengaja untuk pembukaan lahan yang abu sinyanya berfungsi sebagai pupuk, api akibat kelalaian, tidak hati-hati seperti membuang rokok, pembakaran sampah dan sisa-sisa perkemahan atau pembakaran untuk pembukaan lahan yang tak terkendali. Ada pula api yang sengaja dimunculkan untuk membakar lahan orang lain karena dendam, marah atau agar bisa memperoleh hak atas tanah tanpa membayar ganti rugi (KMNLH dan UNDP, 1997).

METODE PENERAPAN

Melibatkan masyarakat secara pro aktif saat ini sudah menjadi keniscayaan bagi tercapainya tujuan kegiatan pengabdian masyarakat. Salah satu metode yang acap digunakan untuk mendorong kepedulian dan keaktifan masyarakat adalah melalui penyuluhan dan pendampingan. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting guna mencapai tujuan dan sasaran suatu kegiatan dan program pembangunan. Metode ini mampu menjadi alat guna mengumpulkan data dan informasi berbagai situasi, kondisi, keperluan, kepentingan dan posisi sikap masyarakat setempat. Semakin besar keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam urusan mereka sendiri, maka semakin besar pula manfaat dan pencapaian tujuan kegiatan tersebut. Sebaliknya, masyarakat pun memiliki kekuatan untuk menghambat kegiatan itu apabila mereka tidak terabaikan dari proses pengambilan kebijakan. Keterlibatan aktif masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan satu di antaranya adalah melalui lembaga. Semakin kuat kelembagaan di tingkat masyarakat, semakin mudah untuk menjangkau aspirasi mereka. Melalui metode ceramah dan FGD (Focus Group Discussion) maka peran aktif masyarakat menjadi besar untuk menyelesaikan persoalan yang sehari-hari mereka hadapi.

Secara umum pada saat ini kelompok usaha tani dan masyarakat menghadapi sejumlah kendala yang terkait dengan pengetahuan sistem pengolahan lahan tanpa bakar yang sebenarnya berperan untuk meminimalisir peristiwa kebakaran hutan dalam lahan, peran pemerintah yang kurang optimal dalam mendampingi masyarakat dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan serta kurangnya pemahaman terkait pemanfaatan lahan bekas terbakar untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian mereka.

Semua persoalan ini diurai dengan cara meningkatkan pengetahuan masyarakat, membangun kesadaran, memperkuat kelembagaan yang telah ada melalui sosialisasi dan pelatihan. Keberhasilan kegiatan untuk memperkuat kelembagaan, pengetahuan serta teknologi di tingkat masyarakat diukur dengan jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam lembaran kuisioner yang diberikan kepada masyarakat.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Ada tiga aspek pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat di Kecamatan Dayun agar memiliki pemahaman dan sadar terhadap fungsi hutan-lahan gambut, bahaya kebakaran serta dampak ekologis dan hukum. Tiga aspek tersebut meliputi pemberian pengetahuan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar atau semi bakar, penguatan aspek ekonomi dan penguatan sistem kelembagaan.

Pertama, aspek teknologi. Persoalan membakar yang dijadikan sebagai teknologi pembukaan lahan secara tradisional, murah, udah dan cepat sudah harus ditinggalkan masyarakat. Teknologi sederhana di tingkat anggota petani dan kelompok tani harus ditingkatkan sehingga mampu membuat sistem pengolahan lahan tanpa bakar secara baik dan berkelanjutan. Ada beberapa teknologi yang disampaikan kepada masyarakat untuk membuka lahan sehingga tidak menimbulkan kebakaran di lahan atau hutan.

Pertama, dengan peralatan berat. Penggunaan alat berat akan memudahkan masyarakat dalam membuka lahan untuk kegiatan pertanian mereka. Menggunakan alat berat dalam membersihkan lahan untuk kegiatan pertanian akan lebih efektif dari aspek dampak lingkungan.

Tidak dapat dimungkiri bahwa metode menggunakan alat berat ini memiliki keterbatasan baik dari aspek kepemilikan oleh masyarakat petani terutama dari segi pengadaan alat berat baik dalam pembelian atau penyewaan juga dalam pemanfaatan dan pemeliharannya. Akan tetapi persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara peran serta sektro swasta dan atau pemerintah. Sektor swasta yang beroperasi di sekitar kawasan masyarakat dapat menyalurkan program *community development*-nya dalam upaya pembersihan lahan.

Keterlibatan sektor swasta secara langsung dalam kegiatan masyarakat selain mendekatkan pihak pengusaha dengan masyarakat juga menjadi bagian dari tanggungjawab dan sosial serta membangun hubungan saling menguntungkan.

Selanjutnya keterlibatan pemerintah daerah dan pusat dalam memfasilitasi pengadaan atau pemanfaatan alat berat secara simultan di daerah-daerah yang menjadi pengembangan kawasan perkebunan dan pertanian warga. Pemerintah dapat menyediakan alat berat di setiap kecamatan dan masyarakat serta kelompok masyarakat dapat memanfaatkan secara bergilir sesuai dengan skala prioritas. Model seperti ini telah dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk membuat tanggul di perkebunan dan lahan pertanian warga setempat. Kawasan Indragiri Hilir yang berada di muara sungai Indragiri rentan dimasuki air asin dari laut. Bila ini terjadi maka tanaman masyarakat akan rusak dan mengurangi hasil panen. Pembuatan tanggul menggunakan alat berat yang difasilitasi pemerintah setempat telah mampu menghalangi masuknya air laut ke kawasan pertanian warga sehingga volume hasil dan kualitas hasil pertanian dan perkebunan warga jadi meningkat.

Cara selanjutnya semi bakar. Masyarakat yang melakukan pembersihan lahan dengan menebang tebas dapat memasukkan tanaman tersebut ke dalam drum yang diberi penutup dan lubang. Sampah dan sisa hasil pembersihan lahan dibakar di dalam drum sehingga api dapat dikontrol penyebarannya. Teknologi lain yang disosialisasikan kepada warga adalah menggunakan 'agen' pembusuk yakni mikroorganisme M4. Pada lahan yang sudah ditebang tebas warga dapat menuangkan sejumlah larutan mikroba yang mempercepat terjadinya pembusukan sehingga menjadi pupuk kompos.

Teknologi selanjutnya adalah menggunakan cara pembusukan manual. Petani dapat memilih waktu pembersihan lahan di musim penghujan dan dibiarkan hingga membusuk selama beberapa bulan selama musim hujan. Pada saat musim panas tiba, sisa-sisa tumbuhan yang ditebang tebas telah membusuk dan menjadi nutrisi untuk tumbuhan yang akan ditanam. Pemanfaatan teknologi ini lebih mudah diterima warga mengingat biaya untuk kegiatan pembersihan lahan mereka menjadi lebih murah dan mudah walaupun harus menunggu waktu yang lebih lama. Sejumlah warga Kampung Dayun telah membuktikan teknik ini berhasil meningkatkan kesuburan tanah dan menghindari teknik bakar. Teknik membakar sudah mulai ditinggalkan warga Kampung Dayun terkait dampak yang ditimbulkannya serta sanksi berat untuk para pelakunya.

Kedua, penguatan pengetahuan dari aspek ekonomi adalah bagian kedua dari kegiatan pengabdian ini. Aspek ekonomi juga menjadi sangat penting mengingat salah satu pembukaan lahan dan uas areal pertanian adalah meningkatkan kesejahteraan. Alternatif yang ada adalah petani tidak lagi memperluas lahan perkebunan atau pertanian mereka ke kawasan hutan, namun meningkatkan pemanfaatan lahan yang ada dengan cara menanam tanaman sela di perkebunan sawit dan karet seperti cabe dan semangka. Tujuannya selain mengurangi perambahan dan penambahan lahan baru perkebunan juga meningkatkan produktivitas lahan yang ada. Selain itu petani yang menjadi bagian dari kelompok tani ditingkatkan kemampuannya dalam pengolahan beberapa produk turunan/olahan hasil pertanian produk (up grading product) pertanian tanaman sela seperti pembuatan jelly semangka, kerupuk semangka dan batik semangka. Memperluas dan meningkatkan jaringan pemasaran juga menjadi keniscayaan.

Masyarakat juga diberi masukan terkait sejumlah komoditas yang cenderung jadi pilihan untuk ditanam di lahan-lahan bekas kebakaran, terutama nenas berikut produk turunannya. Warga Kampung Dayun saat ini telah mampu mengembangkan tanaman sela di areal perkebunan mereka berupa tanaman buah semangka dan cabai. Khusus buah semangka, warga setempat telah mampu mengembangkan produk turunan semangka berupa jelly semangka, kerupuk semangka serta pakaian batik khas motif semangka. Khusus produk nenas dan turunannya, warga setempat belum memiliki keinginan mengingat tanaman sela yang telah mereka kembangkan saat ini telah mampu diterima oleh pasar sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka.

Ketiga, dari aspek kelembagaan. Masyarakat Kampung Dayun dilatih untuk memiliki kecakapan mengelola institusi atau organisasi mereka sehingga memiliki kecakapan dalam berorganisasi, mengelola konflik, membuat program bersama serta kemampuan untuk melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan mereka secara mandiri. Warga petani juga dilatih agar memiliki daya tawar yang kuat dengan pihak ketiga. Daya tawar ini diperlukan terutama untuk mendesak pihak swasta dan pemerintah terkait adanya kendala dalam penerapan teknologi pengolahan lahan tanpa bakar melalui pemanfaatan alat berat. Secara kelembagaan, melalui pelatihan maka masyarakat petani telah memiliki kemampuan untuk mendesak kepentingan mereka kepada pemerintah setempat dan kepada pihak ketiga (perusahaan) yang beroperasi di sekitar kawasan untuk memberikan bentuk tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Dengan dilibatkannya para pihak dalam kegiatan ini maka akan terbangun sarana kerjasama pencegahan dan pemadaman kebakaran di lahan sekitar.

Aspek kelembagaan ini juga memperkuat perkumpulan petani dalam wadah resmi sehingga dapat memfasilitasi keperluan anggota terhadap teknologi, pengetahuan, dan hukum. Saat ini di tingkat Kampung Dayun sudah terbentuk peraturan berkaitan dengan larangan untuk mengolah lahan pertanian dengan cara membakar. Hanya saja penerapannya tidak efektif dan tidak optimal mengingat peraturan tersebut sifatnya hanya saran dan anjuran tanpa sanksi bagi para pihak melanggar aturan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan diikuti oleh berbagai latar belakang masyarakat. Petani, ketua RT, ketua RW, aparat pemerintah, aparat keamanan, pemuda, dan mahasiswa. Pada saat FGD dilakukan terungkap bahwa di Kecamatan Dayun, khususnya Kampung Dayun telah terbentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) sebanyak 15 orang secara sukarela. Dalam praktiknya ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan di kampung mereka, warga mengalami kesulitan untuk memadamkan kebakaran api tersebut. Hal ini terjadi karena pertama, peralatan yang ada sudah banyak yang rusak dan tidak terpelihara dengan baik. Pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan alat-alat pemadam tersebut. Kedua, terkait letak kebakaran berada di hutan yang tak memiliki akses jalan sehingga untuk menjangkaunya sambil membawa peralatan pemadam memerlukan waktu yang lama. Ketiga, sumber air untuk memadamkan api sulit didapat karena kanal-kanal air banyak dikendalikan perukaan tanpa bersinergi dengan aparat dan masyarakat setempat.

Bagi masyarakat, hutan merupakan sumber daya alam dan menyediakan manfaat sangat besar untuk keberlanjutan dan kesejahteraan hidup manusia. Seperti manfaat *tangible* berupa manfaat langsung berupa kayu, sementara manfaat *intangibile* atau tidak langsung seperti pengaturan tata air, hiburan, pendidikan, kenyamanan lingkungan dan lain-lain (Affandi & Patana dalam Latifah, 2004:2).

Selanjutnya Arief (2001: 13) mempertegas manfaat *tangible* untuk keperluan kayu perkakas, kayu bakar dan bubur kertas, rotan, kina, sutera alam, kayu putih, gondorukem, kemenyan dan lain-lain. Hutan dapat dibedakan menjadi manfaat, *marketable* dan *non-marketable*. Manfaat *non-marketable* berupa barang dan jasa hutan yang belum diketahui nilai atau belum tersedia pasarnya. Misalnya beberapa jenis kayu lokal, kayu energi, binatang, dan seluruh manfaat *intangibile* hutan. Oleh karena kelestarian hutan perlu dijaga mengngat perannya menjadi sangat utama dalam kehidupan manusia.

Begitu pula halnya dengan lahan gambut karena memiliki nilai sangat penting. Gambut menyediakan hasil hutan berupa kayu dan non kayu, menyimpan dan mensuplai air, menyimpan karbon, dan merupakan habitat beragam beragam hayati flora dan fauna langka. Hanya saja tantangan yang dihadapi saat ini adalah terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan ketersediaan lahan pengembangan seperti pertanian dan perkebunan demi ketahanan pangan, hutan tanaman industri (HTI) kertas, pemukiman penduduk, perkantoran, fasilitas umum dan infrastruktur lainnya telah menyebabkan gambut sebagai pilihan yang tak terelelakkan.

Luasan hutan-hutan rawa gambut kini semakin mengecil akibat penebangan dan pembakaran dan diganti oleh perusahaan perkebunan dan penduduk dengan tanaman terutama kelapa sawit. Padahal saat pengolahan lahan rawa gambut tersebut acap kali dilakukan dengan cara menggali kanal dan mengeringkan lahan basah itu. Tujuannya ketika sudah kering maka akan mudah untuk dibersihkan dengan cara membakar. Mengolah lahan dengan cara membakar sangat efektif karena cepat, mudah, murah mengerjakannya, walaupun memberi dampak buruk pada lingkungan sekitarnya. Cara primitif ini tetap diminati bukan saja oleh masyarakat petani akan tetapi juga oleh perusahaan terutama perkebunan dan HTI. Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan ada yang memperlak masyarakat secara sembunyi-sembunyi melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, sehingga biaya pembukaan lahan menjadi minim dan lebih cepat hasilnya. Padahal inilah pemicu meluasnya kebakaran lahan dan hutan dan perkebunan.

Pembuatan kanal sejatinya dapat dimanfaatkan pemerintah, masyarakat dan perusahaan untuk memadamkan api di musim panas melalui pengaturan air di kanal tersebut. Kenyataannya, kanal yang tidak dikelola untuk kepentingan bersama ternyata menjadi salah satu penyebab terus terjadinya kebakaran hutan dan lahan terutama di daerah gambut. Lahan gambut di Indonesia diperkirakan mencapai 20 juta Ha, dengan cakupan di Pulau Sumatera 6-8 juta Ha. Sebagian sebagian diantaranya berada di Kepulauan Riau (4 juta Ha). Penelitian terakhir menunjukkan di Kepulauan Riau terjadi pengalihan fungsi sebanyak 200.000 Ha lahan gambut menjadi perkebunan sawit. Sementara Riau mempunyai lapisan gambut terdalam di dunia, mencapai 16 meter terutama di wilayah Kuala Kampar. Hanya saja kegiatan pertanian, perkebunan kelapa sawit dan industri kerta dan bubur kertas telah merusak fungsi ekologis lahan gambut.

Perluasan perkebunan sawit di Riau telah mengkonversi lahan gambut, karena kurang lebih kurang seluas 4 juta Ha dari daratannya terdiri dari lahan gambut (BBSDL, 2009). Konversi ini berdampak pada percepatan laju oksidasi, rentan kebakaran, subsiden, banjir, dan intrusi air laut. Gangguan fungsi rawa gambut juga dapat

menyebabkan lepasnya karbon ke atmosfer dan mendorong laju perubahan iklim (CCFPI, 2005; Las, Nugroho dan Hidayat, 2008).

Saat ini kebakaran di kawasan Dayun mayoritas terjadi di lahan yang berbatasan dengan perkebunan milik perusahaan. Saat diinvestigasi tidak diketahui siapa pemilik lahan tersebut, akan tetapi setelah beberapa saat sekelompok warga pendatang kemudian mengolahnya untuk ditanam sawit dan hasilnya ditadahkan perusahaan yang ada di dekatnya.

Masyarakat Peduli Api setempat memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan tugasnya walaupun bekerja secara swadaya. Dana yang tersedia sebesar Rp24 juta/tahun disediakan kampung cenderung hanya dapat dipakai untuk sekali operasi pemadaman kebakaran. Lebih dari itu, dana tidak tersedia sesuai anggaran. Sementara luasan kawasan lahan sulit dijangkau dengan jumlah MPA 15 orang. Dana ini akan semakin terkuras bila dalam kegiatan pemadaman terlibat instansi lain.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan secara partisipatif tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi keniscayaan. Masyarakat merasakan manfaat pentingnya kegiatan sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar untuk kegiatan dan aktivitas mereka sebagai petani. Apa lagi dampak yang ditimbulkan akibat pembakaran lahan sudah sangat besar bukan hanya dari aspek kerugian ekonomi, akan tetapi juga sosial, pendidikan dan kesehatan, transportasi dan lainnya. Masyarakat petani tersadarkan oleh ancaman yang berat terkait dengan pelaku pembakaran lahan dan hutan baik akibat kesengajaan ataupun kelalaian,

Berdasarkan kuisioner yang diberikan di akhir kegiatan, masyarakat mengaku memiliki antusias tinggi terhadap kegiatan pengabdian ini. Ada tiga hal yang menjadi perhatian besar peserta yakni sanksi berat yang diberikan kepada pelaku pembakar lahan dan hutan, penguatan kelembagaan sebagai sarana untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat serta alternatif teknik pembukaan lahan tanpa membakar.

Bagi warga, tidak mungkin mereka membakar lahan perkebunan atau pertaniannya mereka sendiri. Oleh karena itu kebakaran lahan dan hutan di Dayun ada disebabkan faktor pihak ketiga, yaitu warga pendatang serta perusahaan swasta setempat. Sebagian perusahaan yang beroperasi di sana tetapi tidak menjadikan kebakaran dan masyarakat di lokasi dampak kebakaran sebagai objek penerima bantuan *community development* mereka secara prioritas. Bilapun ada bantuan yang diberikan tidak optimal karena prioritas pada bentuk yang lain, bukan pada peralatan pengolahan lahan tanpa bakar dan juga bukan peralatan pemadaman (berikut pemeliharaan dan akses mendapatkan air). Ada kecenderungan perusahaan yang ada di sekitar menolak tidak terlibat dalam berbagai kegiatan masyarakat setempat, padahal ada 20-an perusahaan besar yang beroperasi di sana. Inilah hambatan yang dirasakan warga setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. 2000. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Jakarta: FE-Universitas Indonesia
- Agus, F., & I. G. Subiksa. 2008. Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan, Balai Penelitian Tanah. Badan Litbang Pertanian. Bogor: World Agroforestry Centre.
- Akihiro, K., & I. K. C. Marbawa,. 2000. Manual Dasar-dasar Pengendalian Kebakaran. Bogor: Departemen Kehutanan dan JICA.
- Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. 2009. Identifikasi dan Karakterisasi Lahan Rawan longsor dan Rawan Erosi di Dataran Tinggi untuk Mendukung Keberlanjutan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian. Laporan Tengah Tahun, DIPA 2009. Bogor: Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian.
- Balitbang Provinsi Riau. 2010. Seminar dan Lokakarya: Pengelolaan Terpadu Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Provinsi Riau.
- Dinas Perkebunan Provinsi Riau. 2009. Laporan Tahun. Pekanbaru: Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
- Djajadi, I. 2010. Kearifan Ilmiah & Kearifan Lokal: Pedoman bagi Perumusan Kearifan Lokal Kalbar. Kongres Kebudayaan Kalimantan Barat II.
- Erickson, V. A. 2001. A research paper submitted in partial fulfillment for the masters of science degree with a major in hospitality and tourism. the graduate college university of Wisconsin-stout. Heritage tourism: a case study of the laura Ingalls wilder heritage tourism site at Pepin. Wisconsin: University of Wisconsin.

Hariandja, M. T. E. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Grasindo.

Sardjono, A., & Mustofa. 2004. Mosaik Sosiologis Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumber Daya. Yogyakarta: Debut Press.

Soeriaatmadja. 1997. Ilmu Lingkungan. Bandung: ITB Press.